

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Muhammad Torieq. "Kelembagaan Negara." Dalam *Hukum Tata Negara*. Sukabumi: Haura Utama, 2023.
- Agus Santoso, H.M. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Az, Lukman Santoso. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.
- Huda, Ni'matul. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi." Dalam *Wajah Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Latif, Abdul, dan Ali Hasbi. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998.
- Manan, H. Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009.
- Parluhutan Daulay, Ikhsan Rosyada. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rosidin, H. Utang. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.

- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Smith, Rhona K.M., dan dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Teguh, Harrys Pratama. *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.

Jurnal

- Abadi, Suwarno. "Finalty of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial review." *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016).
- Adam, Haidar. "Dissenting Opinion dan Cocurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017).
- Aritonang, Dinoroy M. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya." *Jurnal Ilmu Administrasi* 10, no. 3 (2013).
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017).

- Fatiha, Alifia Silvi, Sorharjoto, dan Wahyuningsih Santosa. "Pemilihan Umum sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022).
- Febriyansyah, Ferdi, dan Prayitno Sugeng. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres." *Jurnal Mitra Indonesia: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan* 2, no. 3 (2023).
- Hakim, Ihsan Nul. "Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat." *Madania* 18, no. 1 (2014).
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017).
- Iswandi, Kelik. "Extending the Legal Standing on Authority Disputes at the Indonesian Constitutional Court." *Constitutionale* 4, no. 2 (2023).
- Kartini, Dede Sri. "Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 14, no. 1 (2011).
- Kasetyaning Putri, Adeline Dyah, dan Yohanes Suwanto. "Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022).
- Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. *Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovatif* 8, no. 1 (2015).
- Kurniawan, Yahya Luthfi, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, dan Niluh Ketut Candra Kasih. "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023).

- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015).
- Marshanda Zulqarnain, Cantika Dhea, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika. "Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023).
- Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran. "Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Mudatsir, Ahmad. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal Law and Society* 2, no. 2 (2023).
- Muhdar, dan Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia" 1, no. 4 (2023).
- Puspita Sari, Adena Fitri, dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (2022).
- Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014).
- Rangkuti, Afifa. "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum* 5, no. 2 (2018).
- Samsudin, Muhammad Iqbal. "A Comparison of Judicial Review in Indonesian Constitutional Court and French Constitutional Council." *Indonesian Comparative Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Sari, Indah. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2013).

- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).
- Sunarno. "Negara Hukum yang Demokratis." *Universitas Slamet Riyadi* 10, no. 1 (2011).
- Sutejo, Bambang, dan Shaliha Az-Zahra. "Independence of The Constitutional Court In Judicial Review Related To Constitutional Court Laws." *Legal Brief* 11, no. 5 (2022).
- Tirtakusuma, Andreas Eno. "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Bisnis* 6, no. 1 (2020).
- Wibowo, Mardian, I Nyoman Nurjaya, Muhammad Ali Safaat, dan Jazim Hamidi. "The Criticism on The Meaning of 'Open Legal Policy' in Verdicts of Judicial Review at The Constitutional Court." *Constitutional Review* 3, no. 2 (2017).

Internet

- admin. "Anwar Usman Gelar Konferensi Pers Terkait Pemberhentian Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi." *Hallaw* (blog), 9 November 2023. <https://www.hallaw.com/anwar-usman-gelar-konferensi-pers-terkait-pemberhentian-sebagai-ketua-mahkamah-konstitusi/>.
- BBC News Indonesia. "Majelis Kehormatan MK: Dari dugaan kebohongan Anwar Usman sampai batas usia capres-cawapres - Apa saja yang diketahui jelang putusan?," 6 November 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2z39ye819o>.
- BBC News Indonesia. "Majelis Kehormatan MK: Dari dugaan kebohongan Anwar Usman sampai batas usia capres-cawapres - Apa saja yang diketahui jelang putusan?," 6 November 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2z39ye819o>.
- "Jimly Asshidiqie Sebut Semua Hakim MK Bermasalah di Putusan Nomor 90: Anwar Usman Paling Banyak - Nasional Tempo.co." Diakses 19

November 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1792240/jimly-asshidique-sebut-semua-hakim-mk-bermasalah-di-putusan-nomor-90-anwar-usman-paling-banyak>.

Putusan MKMK: Anwar Usman Diberhentikan dari Jabatan Ketua MK, Langgar Etik!, t.t.

“Respon Putusan Mahkamah Konstitusi, Election Corner Pertanyakan Kemana Demokrasi Indonesia – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.” Diakses 29 Desember 2023. <https://fisipol.ugm.ac.id/respon-putusan-mahkamah-konstitusi-election-corner-pertanyakan-kemana-demokrasi-indonesia/>.

S.H, Tri Jata Ayu Pramesti, dan Hukumonline. “Arti Cacat Hukum,” 7 Juli 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-1t556fa8a2b1100/>.

Wahdah, Dava Maulana. “Dilema ‘Open Legal Policy’ Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Medium* (blog), 16 Oktober 2023. <https://medium.com/@dava.maulanawahdah23/dilema-open-legal-policy-dalam-putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023-386b07e6bdc1>.

Wardah, Fathiyah. “Akankah Keputusan MKMK Mengembalikan Kepercayaan Publik ke MK?” VOA Indonesia, 7 November 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/akankah-keputusan-mkmk-mengembalikan-kepercayaan-publik-ke-mk-/7343790.html>.

Kamus

“Hasil Pencarian - KBBI VI Online.” Diakses 24 Desember 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>.

Undang-Undang / Peraturan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023

Pasal 24C UUD 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011